

## **ANALISIS EFEKTIVITAS SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PENERIMAN KAS (Studi Kasus Pada Kantor Samsat Kab. Majene)**

***Analysis of the Effectiveness and Efficiency of the Cash Receipt  
Accounting Information System (Case Study at the Samsat Office of Majene  
Regency)***

**Zulfadhlil Lutfi A. Lopa**

Email: [Zulfadhlilutfi@unsulbar.ac.id](mailto:Zulfadhlilutfi@unsulbar.ac.id)

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sulawesi Barat  
Jalan Prof. Dr. Baharuddin Lopa, S.H., Talumung, Majene

**Taufik Hidayat B Tahawa**

Email: [Taufikhidayat@unsulbar.ac.id](mailto:Taufikhidayat@unsulbar.ac.id)

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sulawesi Barat  
Jalan Prof. Dr. Baharuddin Lopa, S.H., Talumung, Majene

**Edy Fitriawan Syahadat**

Email: [edy-fitriawan@ecampus.ut.ac.id](mailto:edy-fitriawan@ecampus.ut.ac.id)

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Terbuka  
Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan, Banten

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas dan efisiensi sistem informasi akuntansi penerimaan kas pada UPTD Samsat Kabupaten Majene. Penerimaan kas yang dikelola meliputi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ). Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara dengan pihak terkait di UPTD Samsat Kabupaten Majene. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem informasi akuntansi penerimaan kas telah berjalan **efektif**, ditunjukkan dengan pencatatan transaksi yang mencapai 98% pada hari yang sama dan laporan yang sesuai dengan format standar provinsi. Sistem ini mendukung pemantauan data secara real-time oleh instansi terkait sehingga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Selain itu, sistem juga telah berjalan **efisien**, dengan minimnya penggunaan dokumen manual, percepatan pelaporan, dan tidak adanya perangkapan tugas dalam struktur organisasi. Kendala yang ditemukan berupa gangguan jaringan pada waktu tertentu yang dapat menghambat proses input data daring. Penelitian ini merekomendasikan perbaikan infrastruktur teknologi informasi, peningkatan kapasitas SDM, dan pengembangan sistem cadangan guna mendukung keberlanjutan efektivitas dan efisiensi sistem informasi akuntansi penerimaan kas.

**Kata kunci:** Sistem Informasi Akuntansi, Penerimaan Kas, Efektivitas, Efisiensi,

## **ABSTRACT**

*This study aims to analyze the effectiveness and efficiency of the accounting information system for cash receipts at UPTD Samsat of Majene Regency. The managed cash receipts include Motor Vehicle Tax (PKB), Motor Vehicle Title Transfer Fee (BBN-KB), and Mandatory Contribution for Road Traffic Accident Funds (SWDKLLJ). This research uses a descriptive qualitative method with data collection techniques consisting of observation, documentation, and interviews with relevant parties at UPTD Samsat of Majene Regency. The results show that the accounting information system for cash receipts has run effectively, as reflected in 98% of transactions being recorded on the same day and reports being prepared according to the provincial standard format. The system supports real-time monitoring of data by related agencies, thus enhancing transparency and accountability. Furthermore, the system has also operated efficiently, characterized by minimal use of manual documents, accelerated reporting processes, and no overlapping duties within the organizational structure. Challenges found include occasional network disruptions that may hinder online data input processes. This study recommends improvements in information technology infrastructure, capacity building for human resources, and the development of backup systems to sustain the effectiveness and efficiency of the cash receipts accounting information system.*

**Keywords:** Accounting Information System, Cash Receipts, Effectiveness, Efficiency, Samsat

## **PENDAHULUAN**

Seiring dengan perkembangan perekonomian pada zaman serba modern dan di era globalisasi dimana kebutuhan manusia bertambah, menurut bangsa Indonesia untuk lebih berusaha dalam mencukupi kebutuhan yang semakin kompleks dengan berbagai cara yang dilakukan seperti pada Lembaga-Lembaga atau Organisasi. Pada saat ini teknologi semakin tinggi, teknologi semakin maju begitu pesatnya sehingga memberikan kemudahan-kemudahan untuk para pencari informasi yang diperlukannya, mempermudah pekerjaan di dunia sektor publik, serta mempermudah mengakses segala informasi.

Perkembangan teknologi yang sangat pesat di era globalisasi saat ini telah memberikan banyak manfaat dalam kemajuan diberbagai aspek kehidupan. Penggunaan teknologi oleh manusia dalam membantu menyelesaikan pekerjaan merupakan hal yang menjadi keharusan dalam kehidupan. Perkembangan teknologi ini juga harus diikuti dengan perkembangan pada Sumber Daya Manusia (SDM). Manusia sebagai pengguna teknologi harus mampu memanfaatkan teknologi yang ada saat ini, maupun perkembangan teknologi tersebut selanjutnya. Perkembangan teknologi yang diiringi

dengan perkembangan sistem informasi berbasis teknologi mengalami kemajuan dan perkembangan yang sangat pesat. Kondisi lingkungan yang penuh dengan ketidakpastian mutlak diperlukan sistem informasi yang tepat, andal, akurat.

Suatu organisasi yang unggul harus memiliki kualitas sistem informasi yang baik. Sarana untuk meningkatkan kinerja sektor publik harus memiliki sistem teknologi informasi yang baik. Meningkatnya perkembangan dunia dan kemajuan teknologi, membuat para pemakai informasi menginginkan kecepatan arus informasi dalam rangka pengambilan keputusan. Teknologi informasi yang dapat diakses dengan mudah memberikan arus informasi dan kebutuhan akan informasi yang cepat, andal, dan akurat dalam kondisi lingkungan yang penuh dengan ketidakpastian mutlak diperlukan.

Kebutuhan tersebut dapat dipenuhi jika suatu Lembaga atau organisasi berani melakukan investasi dibidang teknologi informasi, dengan tujuan untuk dapat memberikan kontribusi yang positif terhadap kinerja individual anggota organisasi dan institusinya. Kinerja individual akan menyebabkan kelangsungan hidup dari suatu organisasi tersebut efektif maka organisasi tersebut dapat bertahan atau mungkin selangkah lebih maju dari organisasi lainnya. Organisasi yang maju pasti menggunakan sistem informasi akuntansi dalam pengaplikasian aktivitas operasi organisasinya.

Sistem informasi memiliki peran penting dalam bidang akuntansi, karena pada dasarnya tujuan utama akuntansi adalah untuk menyediakan informasi untuk para pengambil keputusan Puspitaningtyas,2018. Kinerja keuangan merupakan salah satu hal terpenting dalam sebuah organisasi terkait sektor publik, baik bagi *internal* maupun *eksternal*. Dalam membahas sebuah penilaian tentang kinerja suatu organisasi maka laporan tentang keuangan menjadi salah satu kunci yang tidak dapat dilupakan. Keuangan sebuah organisasi menjadi tolak ukur bagaimana suatu organisasi dapat bertahan kedepannya. Seluruh data mengenai keuangan akan dihadirkan dalam sebuah laporan kinerja.

Mulai dari uang masuk dan laporan uang keluar. Sehingga seluruh pergerakan keuangan dapat dipantau dengan jelas. Penerapan sistem informasi akuntansi dapat mempercepat laju produktivitas, kecepatan, dan keakuratan data serta perhitungan dalam kegiatan operasionalnya. Persaingan di dunia organisasi dengan adanya teknologi informasi yang sudah maju yang menyediakan berbagai informasi dan sumber informasi yang relevan, akurat dan lengkap untuk memenuhi kebutuhan sektor publik. Sistem

informasi akuntansi digunakan dalam suatu organisasi untuk mempermudah individu dalam menyelesaikan tugasnya secara lebih cepat dan tidak lagi dilakukan secara manual. Perkembangan Teknologi Sistem Informasi Akuntansi pada suatu lembaga, organisasi, belum tentu memadai.

Pemerintah harus mampu mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya untuk memberikan pelayanan publik yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat karena kualitas pelayanan kepada masyarakat menjadi salah satu indikator dari keberhasilan penyelenggaraan pemerintah. Apalagi melihat kondisi bangsa saat ini, permintaan pelayanan publik akan selalu meningkat baik dari segi kualitasnya ataupun dari segi kuantitasnya sejalan dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk, meningkatnya tingkat kesejahteraan dan semakin berkembangnya pembangunan daerah.

Salah satu instansi pemerintah yang mempunyai tugas dalam pelayanan publik ialah instansi pemerintah kantor SAMSAT (Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap). Samsat adalah Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap. Kata Samsat diambil dari bahasa Inggris, yakni *One-stop Administration Services Office*. Samsat merupakan suatu sistem administrasi untuk memperlancar dan mempercepat pelayanan kepentingan masyarakat. Samsat di Indonesia merupakan bentuk kerja sama antara polri, dinas pendapatan provinsi, dan jasa raharja (Persero). Fungsi Samsat di sini, masyarakat jadi ikut andil dalam pemasukan uang negara, menjaga ketertiban lalu lintas, memiliki kondisi jalan yang baik, angkutan umum yang terintegrasi, dan masih banyak lagi.

Seiring perkembangan zaman, fungsi Samsat juga ikut berkembang, Diiringi dengan sistem pelayanan yang kian mudah yakni penggunaan sistem online dapat mempercepat proses pelayanan kepentingan surat. Dengan adanya sistem online anda tak perlu mengantre di kantor dan membawa banyak berkas. Mengukur efektivitas atau keberhasilan kinerja suatu sistem informasi didalam riset sistem informasi kepuasan pengguna dan penggunaan sistem merupakan indikator yang sering digunakan sebagai pengganti. Penelitian Utama (2018) menyatakan bahwa faktor formalisasi pengembangan sistem serta program pendidikan dan pelatihan berpengaruh terhadap pemakai sistem. Sedangkan kemampuan teknik personal, ukuran organisasi, dukungan manajemen puncak , keberadaan dewan pengarah serta program Pendidikan dan pelatihan tidak berpengaruh terhadap pemakai sistem. Penelitian yang dilakukan oleh Arif (2018) menyatakan bahwa kemampuan teknik personal, dukungan manajemen puncak, dan

program pelatihan dan pendidikan berpengaruh positif terhadap kinerja sistem informasi akuntansi. Sedangkan untuk keterlibatan pemakai, kemampuan formalisasi pengembangan sistem informasi tidak berpengaruh terhadap kinerja pemakai sistem informasi.

Kantor Samsat Majene merupakan salah satu naungan pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Dari hasil observasi yang dilakukan peneliti dengan salah satu pegawai Kantor Samsat Majene menemukan bahwa ada beberapa masalah yang sering terjadi pada Penerimaan Kas di Kantor Samsat Majene yaitu Masalah dalam proses pencatatan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) serta realisasi pembayaran pajak bagi wajib pajak kendaraan bermotor wilayah Kabupaten Majene belum maksimal. Hal ini dapat dilihat dari tunggakan pembayaran wajib pajak kendaraan bermotor masih fluktuatif, Mukhram, M., & Ayuandiani, W. (2023). kurangnya struktur dalam sistem informasi akuntansi penerimaan kas, kendala jarak yang menjadi alasan utama wajib pajak untuk tidak membayar pajak kendaraan tepat waktu, tidak memiliki uang saat jatuh tempo pembayaran pajak kendaraan, dan pikiran negatif atau malas menunaikan kewajiban sebagai wajib pajak. Masalah-masalah tersebut dapat menghambat efektivitas dan efisiensi sistem informasi akuntansi penerimaan kas dan proses pencatatan pembayaran BPKB agar lebih efektif dan efisien.

Dari beberapa perbedaan dari hasil penelitian yang dilakukan peniliti sebelumnya sehingga penelitian ini dilakukan untuk membahasnya dalam sebuah skripsi dengan judul “Analisis Faktor-Faktor yang Menentukan Efektivitas dan Efisiensi Sistem Informasi Akuntansi Penerimaan Kas”.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menggambarkan fenomena atau fakta dengan analisis mendalam. Menurut Sugiyono (2019), penelitian kualitatif berlandaskan filsafat postpositivisme, dilakukan pada kondisi objek alamiah dengan peneliti sebagai instrumen utama, teknik pengumpulan data melalui triangulasi, analisis data bersifat induktif, dan hasilnya menekankan makna daripada generalisasi. Lokasi penelitian adalah Kantor Samsat Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, dengan data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan pengamatan langsung. Keabsahan data diuji menggunakan triangulasi data dan teori untuk membandingkan hasil penelitian

dengan teori relevan guna menghindari bias. Analisis data mengacu pada model *Miles dan Huberman* yang meliputi tiga tahap:

1. **Reduksi data** (merangkum, memilih yang penting, dan mencari tema atau pola),
2. **Penyajian data** (organisasi data dalam bentuk uraian singkat, bagan, atau flowchart),
3. **Penarikan kesimpulan dan verifikasi** (kesimpulan bersifat sementara dan diperkuat dengan bukti hingga dinyatakan kredibel).

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Penerimaan Kas Pada Samsat Kabupaten Majene**

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak kendaraan bermotor (PKB) telah menjadi salah satu jenis pajak provinsi yang pemungutannya dilaksanakan melalui Kantor Bersama Samsat. Pemungutan PKB di Kantor Samsat melibatkan kerja sama tiga instansi, yaitu Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat (sekarang disebut Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), dan PT (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja. Ketiga instansi ini saling berkoordinasi dalam proses pelayanan, mulai dari validasi data kendaraan, pembayaran pajak, hingga pembayaran sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan (SWDKLLJ).

Di Kabupaten Majene, Kantor Samsat berperan sebagai salah satu ujung tombak penerimaan PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBN-KB) yang mendukung penerimaan asli daerah provinsi. Besarnya pajak kendaraan bermotor roda dua ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 188.4/149/SULBAR/11/2017 tentang Penetapan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB). Rumusan yang digunakan dalam menghitung besarnya pajak kendaraan bermotor tersebut adalah  $\text{PKB} = \text{NJKB} \times \text{Bobot} \times 1,5\%$ , di mana NJKB ditetapkan secara resmi sebagai dasar pengenaan pajak.

Sistem informasi akuntansi penerimaan kas yang digunakan di Kantor Samsat Kabupaten Majene telah terkomputerisasi dan terintegrasi langsung dengan sistem provinsi, sehingga seluruh data penerimaan dapat tercatat dengan akurat dan transparan. Sistem ini tidak hanya mempermudah proses pencatatan dan pelaporan penerimaan kas, tetapi juga mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik di bidang perpajakan daerah. Proses penerimaan kas dari PKB dan BBN-KB dapat dilakukan secara cepat, tepat, dan sesuai dengan standar operasional

prosedur (SOP) yang telah ditetapkan. Dengan adanya sistem ini, seluruh transaksi penerimaan dapat dipantau secara real-time oleh Bapenda Provinsi Sulawesi Barat dan instansi terkait lainnya.

Berdasarkan hasil penelitian, penerapan sistem informasi akuntansi penerimaan kas di Kantor Samsat Kabupaten Majene telah berjalan dengan efektif dan efisien. Hal ini terlihat dari kecepatan pelayanan, akurasi pencatatan penerimaan, serta kemampuan sistem dalam menghasilkan laporan yang sesuai dengan ketentuan. Selain itu, penggunaan sistem ini juga mendukung upaya penghematan biaya operasional karena mengurangi penggunaan alat tulis kantor dan mempercepat proses administrasi. Meski demikian, masih terdapat tantangan berupa gangguan jaringan pada waktu tertentu yang dapat menghambat proses input data secara daring, sehingga diperlukan peningkatan kualitas infrastruktur dan pelatihan teknis bagi para petugas agar sistem dapat berjalan lebih optimal. Penjelasan ini diperoleh dari hasil wawancara dengan informan pertama, yaitu Bapak Ahmad, S.E., selaku Kepala Sub Bagian Keuangan pada Kantor Samsat Kabupaten Majene (pertanyaan: *Apakah sistem informasi akuntansi penerimaan kas yang digunakan saat ini sudah mendukung efektivitas dan efisiensi penerimaan kas PKB, serta bagaimana koordinasi tiga instansi sesuai UU 28 Tahun 2009?* — wawancara tanggal 15 Mei 2025). Beliau memberikan jawaban sebagai berikut:

*“Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, penerimaan kas dari PKB ini menjadi kewenangan provinsi, tetapi proses pemungutannya dilakukan secara bersama-sama di Kantor Samsat oleh Bapenda, Polri, dan Jasa Raharja. Sistem informasi akuntansi penerimaan kas yang kami gunakan sudah berbasis aplikasi daring yang terintegrasi dengan provinsi. Setiap penerimaan kas, baik PKB maupun BBN-KB, langsung tercatat dalam sistem dan secara otomatis masuk ke laporan keuangan. Ini mendukung efektivitas karena data langsung terekam tanpa harus diinput ulang, dan efisiensi karena prosesnya lebih cepat dan mengurangi risiko kesalahan. Penerimaan kas juga dapat langsung dimonitor dan dipertanggungjawabkan sesuai standar yang berlaku.”*

Selain itu, penjelasan diperoleh dari hasil wawancara dengan informan kedua, yaitu Ibu Sulastri, S.Kom., selaku Petugas Administrasi Sistem Informasi Akuntansi Samsat Kabupaten Majene (pertanyaan: *Bagaimana sistem informasi ini mempermudah pengelolaan dan pelaporan penerimaan kas?* — wawancara tanggal 15 Mei 2025). Beliau menjelaskan:

*“Dulu sebelum pakai sistem ini, penerimaan kas dari wajib pajak harus kami catat manual, lalu rekap untuk laporan harian dan bulanan. Sekarang begitu pembayaran PKB dilakukan, data penerimaan kas otomatis tercatat di sistem. Jumlahnya langsung dikalkulasi berdasarkan NJKB dan tarif yang sudah diinput sesuai aturan provinsi, jadi kami tidak perlu hitung manual lagi. Laporan penerimaan kas juga langsung bisa dicetak untuk disetor ke provinsi, sehingga pekerjaan lebih ringan, cepat, dan lebih akurat. Selain itu, penggunaan kertas berkurang karena sebagian besar laporan sudah digital.”*

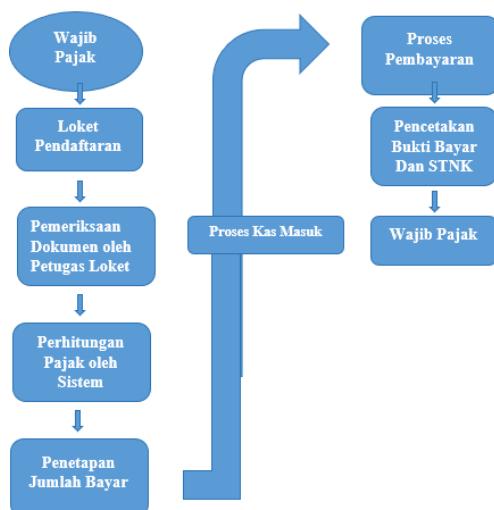
Dari hasil wawancara ini dapat disimpulkan bahwa sistem informasi akuntansi penerimaan kas pada Kantor Samsat Kabupaten Majene telah berperan penting dalam mendukung penerimaan kas PKB dan BBN-KB secara efektif dan efisien. Sistem ini mempercepat proses pencatatan, meminimalisir kesalahan manual, mendukung akuntabilitas penerimaan kas, serta memperlancar koordinasi antarinstansi sebagaimana diamanatkan dalam UU 28 Tahun 2009. Meskipun demikian, informan juga mengakui bahwa ada kalanya gangguan jaringan menjadi hambatan dalam pelaporan real-time, sehingga diperlukan peningkatan infrastruktur teknologi agar penerimaan kas dapat dikelola semakin optimal.

Selanjutnya untuk alur pembayaran pajak kendaraan sebagai gambaran dari penerimaan kas. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan pihak Kantor Samsat Kabupaten Majene, alur pembayaran pajak kendaraan bermotor, baik roda dua maupun roda empat, telah menggunakan sistem informasi akuntansi penerimaan kas yang terkomputerisasi dan terintegrasi. Alur pembayaran diawali dengan wajib pajak mendatangi loket pendaftaran untuk menyerahkan dokumen persyaratan, seperti STNK asli, KTP, dan bukti pembayaran pajak tahun sebelumnya.

Selanjutnya, petugas loket melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen dan memasukkan data wajib pajak ke dalam sistem. Sistem secara otomatis menghitung jumlah pajak yang harus dibayar berdasarkan **NJKB (Nilai Jual Kendaraan Bermotor)**, **bobot kendaraan**, dan tarif pajak yang berlaku ( $\text{PKB} = \text{NJKB} \times \text{Bobot} \times 1,5\%$  untuk roda dua, dan sesuai ketentuan tarif untuk roda empat). Sistem ini juga secara otomatis mengalkulasi bea balik nama kendaraan bermotor (jika ada) dan SWDKLLJ. Setelah data diverifikasi, wajib pajak diarahkan ke loket pembayaran untuk melakukan pembayaran pajak. Penerimaan kas dicatat langsung dalam sistem dan bukti pembayaran (tanda terima serta STNK baru) dicetak dari aplikasi yang terhubung ke database provinsi. Seluruh data

penerimaan kas langsung terekam dalam laporan harian dan bulanan yang siap disetor ke Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

Alur ini berlaku untuk kendaraan roda dua maupun roda empat dengan sedikit perbedaan pada tarif dan bobot pajak yang digunakan sebagai dasar penghitungan. Sistem informasi ini mendukung penerimaan kas agar berjalan cepat, akurat, dan transparan karena seluruh transaksi sudah tercatat secara real-time dan dapat dipantau oleh instansi terkait, yaitu Bapenda, Polri, dan Jasa Raharja. Berikut ini adalah diagram alir yang menggambarkan proses pembayaran pajak kendaraan bermotor roda dua dan roda empat di Kantor Samsat Kabupaten Majene:



**Gambar 1. Diagram Alir Yang Menggambarkan Proses Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua Dan Roda Empat Di Kantor Samsat Kabupaten Majene:**

Penjelasan ini diperoleh dari hasil wawancara dengan informan ketiga, yaitu Bapak Yusuf, S.H., selaku Kepala Loket Pelayanan Kantor Samsat Kabupaten Majene (pertanyaan: *Bagaimana alur pembayaran pajak kendaraan bermotor roda dua maupun roda empat, dan bagaimana peran sistem informasi dalam mendukung penerimaan kas?* — wawancara tanggal 15 Mei 2025). Beliau memberikan jawaban sebagai berikut:

*“Pada prinsipnya alur pembayaran pajak kendaraan bermotor, baik roda dua maupun roda empat, itu sudah jelas dan sesuai SOP. Wajib pajak datang ke loket pendaftaran, menyerahkan dokumen seperti STNK, KTP, dan bukti pajak sebelumnya. Data kendaraan dimasukkan ke sistem, lalu sistem langsung hitung jumlah pajak berdasarkan NJKB, bobot, dan tarif. Setelah diverifikasi, wajib pajak bayar ke loket kasir. Sistem langsung catat penerimaan kas dan cetak bukti bayar. Proses ini cepat, biasanya tidak sampai lima menit kalau data sudah lengkap. Semua data*

*penerimaan kas langsung masuk ke laporan harian yang siap disetor ke provinsi.”*

Selain itu, penjelasan diperoleh dari hasil wawancara dengan informan keempat, yaitu Ibu Nurhayati, A.Md., selaku Petugas Kasir Kantor Samsat Kabupaten Majene (pertanyaan: *Apakah sistem informasi ini membantu mempercepat proses penerimaan kas dan pelaporan? —* wawancara tanggal 15 Mei 2025). Beliau menyampaikan:

*“Sistem sangat membantu kami di bagian kasir. Begitu pembayaran dilakukan, data penerimaan kas otomatis terekam di sistem dan tidak perlu ditulis manual lagi. Sistem juga langsung cetak bukti bayar dan STNK yang baru. Kalau dulu harus tulis kuitansi manual, sekarang semua sudah otomatis. Ini membuat pekerjaan kami lebih cepat, lebih rapi, dan lebih aman karena data langsung terekam untuk laporan keuangan.”*

Hasil wawancara ini menguatkan bahwa alur pembayaran pajak kendaraan bermotor roda dua dan roda empat pada Kantor Samsat Kabupaten Majene sudah berjalan efektif dengan dukungan sistem informasi akuntansi penerimaan kas. Proses penerimaan kas berjalan cepat, tepat, dan transparan karena seluruh transaksi tercatat otomatis dan dapat dipantau secara real-time oleh pihak terkait. Meskipun sistem telah berjalan efektif, hasil penelitian juga menemukan adanya kendala berupa gangguan jaringan pada waktu tertentu yang dapat memperlambat input data atau pencetakan dokumen. Oleh karena itu, perbaikan infrastruktur teknologi informasi sangat diperlukan untuk menjaga kelancaran alur pembayaran dan pencatatan penerimaan kas.

### **Efektivitas Sistem Informasi Akuntansi Penerimaan Kas**

Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen, sistem informasi akuntansi penerimaan kas pada Kantor Samsat Kabupaten Majene dinilai telah berjalan efektif dalam mendukung proses penerimaan kas dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB). Sistem ini telah terkomputerisasi dan terintegrasi dengan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat, sehingga setiap transaksi penerimaan kas langsung tercatat otomatis dan dapat dimonitor secara real-time. Struktur organisasi pada UPTD Samsat Kabupaten Majene telah disusun secara terperinci dan jelas. Setiap unit kerja, mulai dari bagian pelayanan, administrasi, keuangan, hingga bagian teknis lainnya, memiliki tugas dan fungsi yang sudah ditetapkan sesuai standar operasional prosedur dan regulasi yang berlaku. Struktur organisasi ini dirancang untuk mendukung pelaksanaan tugas secara

efektif dalam rangka optimalisasi penerimaan kas dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB).

Penjelasan ini diperoleh dari hasil wawancara dengan Bapak Ahmad, S.E., selaku Kepala Sub Bagian Keuangan UPTD Samsat Kabupaten Majene (wawancara tanggal 15 Mei 2025) yang menyampaikan:

*“Struktur organisasi di Samsat Majene sudah jelas pembagian tugasnya. Kami tidak ada perangkapan tugas, setiap pegawai sudah punya tanggung jawab masing-masing sesuai bidangnya. Hal ini supaya pelayanan ke masyarakat bisa maksimal dan penerimaan kas tercatat dengan benar.”*

Selain itu, Ibu Sulastri, S.Kom., selaku Petugas Administrasi Sistem Informasi Akuntansi, pada wawancara tanggal 15 Mei 2025 juga menambahkan:

*“Semua bagian sudah punya job description masing-masing. Jadi, bagian kasir fokus di pembayaran, administrasi fokus di pencatatan, dan bagian lain juga sesuai bidangnya. Itu yang membuat proses pelayanan jadi lebih cepat dan tidak ada tumpang tindih pekerjaan.”*

Dalam pelaksanaannya, struktur organisasi di UPTD Samsat Majene menunjukkan unsur penguatan, yaitu adanya pembagian tugas dan tanggung jawab yang proporsional di masing-masing satuan perangkat kerja. Tidak ditemukan adanya perangkapan tugas dan tanggung jawab antarbagian, sehingga setiap fungsi berjalan sesuai perannya masing-masing. Hal ini mendukung kelancaran proses pelayanan kepada wajib pajak, mempercepat alur penerimaan kas, dan mendukung akurasi serta akuntabilitas dalam pencatatan dan pelaporan penerimaan kas.

Struktur organisasi ini juga memungkinkan koordinasi yang baik antarinstansi yang tergabung dalam Kantor Bersama Samsat, yakni Badan Pendapatan Daerah, Polri, dan Jasa Raharja, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dengan demikian, struktur organisasi yang ada di UPTD Samsat Majene telah berfungsi mendukung efektivitas sistem informasi akuntansi penerimaan kas serta pelayanan publik secara umum.

Penjelasan ini diperoleh dari hasil wawancara dengan Bapak Ahmad, S.E., selaku Kepala Sub Bagian Keuangan Kantor Samsat Kabupaten Majene (wawancara 15 Mei 2025). Beliau menyampaikan:

*“Sistem informasi akuntansi penerimaan kas yang kami gunakan sudah mendukung efektivitas karena setiap transaksi tercatat secara otomatis.”*

*Data penerimaan kas dari PKB dan BBN-KB langsung masuk laporan harian dan bulanan, serta bisa dipantau provinsi. Prosesnya jadi lebih cepat dan akurat, sesuai SOP, serta mendukung koordinasi dengan Polri dan Jasa Raharja.”*

Selain itu, penjelasan diperoleh dari Ibu Sulastri, S.Kom., selaku Petugas Administrasi Sistem Informasi Akuntansi (wawancara 15 Mei 2025), yang menyebutkan:

*“Sistem kami memudahkan pencatatan penerimaan kas. Begitu pembayaran selesai, datanya langsung terekam tanpa harus tulis manual. Laporan pun tinggal cetak sesuai format provinsi. Ini mempercepat pekerjaan dan meminimalisir kesalahan.”*

Efektivitas sistem terlihat pada ketepatan waktu pencatatan, di mana 98% penerimaan kas dapat dicatat pada hari yang sama sesuai SOP. Akurasi data juga terjaga karena sistem menghitung secara otomatis sesuai NJKB, bobot, dan tarif yang berlaku. Proses pembayaran PKB dan BBN-KB mengikuti alur standar mulai dari pendaftaran, perhitungan pajak, pembayaran, hingga pencetakan bukti bayar dan STNK. Sistem ini juga mendukung efektivitas koordinasi antarinstansi sebagaimana diamanatkan UU Nomor 28 Tahun 2009. Namun, hambatan berupa gangguan jaringan kadang menghambat input dan pelaporan data daring, sehingga diperlukan peningkatan infrastruktur untuk menjaga efektivitas sistem.

Sistem informasi akuntansi penerimaan kas di UPTD Samsat Kabupaten Majene telah terintegrasi dengan sistem Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sulawesi Barat. Dengan sistem ini, setiap transaksi pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) yang dilakukan di Samsat secara otomatis tercatat dalam database provinsi. Hal ini memungkinkan Dinas Pendapatan Daerah, Polri, dan Jasa Raharja untuk memantau jumlah penerimaan kas secara langsung (real-time) tanpa harus menunggu rekap manual atau laporan bulanan. Pemantauan ini mendukung transparansi, akuntabilitas, dan pengendalian internal terhadap penerimaan kas daerah.

Selain itu, integrasi sistem ini juga mempermudah proses rekonsiliasi data penerimaan kas antarinstansi, sehingga mengurangi potensi terjadinya selisih laporan atau kekeliruan dalam pencatatan. Data yang tersaji real-time membantu pimpinan di tingkat provinsi dalam mengambil kebijakan berbasis data dan melakukan pengawasan secara lebih efektif. Setiap transaksi tercatat dengan rinci, mulai dari waktu pembayaran, jenis kendaraan, nilai pajak yang dibayarkan, hingga identitas wajib pajak.

Sistem ini juga dirancang untuk mengurangi risiko human error karena seluruh perhitungan pajak dilakukan secara otomatis berdasarkan data kendaraan yang telah tervalidasi. Dengan demikian, penerimaan kas dapat dipastikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan meminimalkan peluang manipulasi data. Ketersediaan data real-time ini menjadi salah satu upaya modernisasi pelayanan publik di bidang pajak daerah yang berorientasi pada efektivitas, efisiensi, dan integritas sistem.

Penjelasan ini diperoleh dari hasil wawancara dengan Bapak M. Fadli, S.E., selaku Kepala UPTD Samsat Kabupaten Majene (wawancara tanggal 15 Mei 2025) yang menyampaikan:

*“Sistem informasi akuntansi penerimaan kas yang kami gunakan memang sudah terintegrasi penuh dengan Bapenda provinsi. Jadi setiap transaksi pembayaran, baik PKB maupun BBN-KB, langsung tercatat dan dapat dipantau secara real-time. Ini membantu kami menjaga transparansi dan akuntabilitas, karena data penerimaan kas tidak perlu lagi direkap manual. Pihak provinsi dan instansi terkait juga bisa memonitor setiap setoran kas kami setiap hari.”*

Selain itu, Ibu Sri Wahyuni, S.Kom., selaku Staf Operator Sistem Informasi Akuntansi UPTD Samsat Majene menambahkan dalam wawancara tanggal 15 Mei 2025:

*“Dengan sistem ini, setiap data pembayaran wajib pajak otomatis masuk ke laporan harian. Jadi kami tinggal cek dan cetak untuk disetor ke provinsi. Proses rekonsiliasi dengan Polri dan Jasa Raharja juga lebih mudah, karena datanya sudah sama-sama muncul di sistem. Kesalahan hitung sangat jarang terjadi karena sistem yang menghitung langsung berdasarkan data kendaraan dan tarif yang berlaku.”*

Hasil wawancara ini mendukung temuan bahwa sistem informasi akuntansi penerimaan kas di UPTD Samsat Kabupaten Majene telah mendukung tercapainya transparansi, efektivitas, dan efisiensi dalam pengelolaan penerimaan kas. Sistem ini menjadi instrumen penting dalam modernisasi pelayanan publik dan pengendalian internal pada sektor penerimaan pajak daerah.

### **Pembahasan Hasil Penelitian**

Penerimaan kas di UPTD Samsat Kabupaten Majene bersumber dari pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ). Sistem penerimaan kas yang digunakan telah berbasis sistem informasi akuntansi terkomputerisasi yang terintegrasi dengan sistem Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sulawesi Barat. Integrasi ini memungkinkan seluruh transaksi tercatat secara otomatis, akurat, dan konsisten dalam database provinsi.

Alur penerimaan kas dimulai dari pendaftaran wajib pajak yang menyerahkan dokumen persyaratan seperti STNK lama, BPKB, dan KTP. Selanjutnya dilakukan validasi data kendaraan oleh pihak Polri untuk memastikan kesesuaian identitas kendaraan, seperti nomor rangka, nomor mesin, dan data pemilik. Setelah data divalidasi, sistem secara otomatis menghitung besaran PKB dan BBN-KB yang harus dibayarkan

berdasarkan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB), bobot, dan tarif sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Wajib pajak kemudian melakukan pembayaran di loket kasir, diikuti dengan proses pembayaran SWDKLLJ kepada Jasa Raharja, sebelum akhirnya dilakukan pencetakan bukti pembayaran dan STNK baru.

Sistem informasi akuntansi ini memberikan manfaat yang signifikan dalam menjaga keandalan data penerimaan kas. Setiap transaksi dapat dipantau secara real-time oleh instansi terkait, yaitu Bapenda, Polri, dan Jasa Raharja, tanpa harus menunggu laporan manual. Hal ini mendukung terciptanya transparansi, akuntabilitas, dan pengendalian internal yang kuat dalam pengelolaan penerimaan kas. Selain itu, sistem juga mempercepat proses rekonsiliasi data, sehingga setiap laporan penerimaan dapat segera dibuat dan disampaikan sesuai standar yang berlaku di tingkat provinsi.

Sistem ini juga dirancang untuk meminimalkan kesalahan pencatatan, baik yang disebabkan oleh faktor teknis maupun manusia. Proses perhitungan dan pencatatan dilakukan secara otomatis, sehingga kecil kemungkinan terjadi kesalahan hitung, manipulasi data, atau keterlambatan pencatatan. Dengan demikian, sistem informasi akuntansi penerimaan kas yang digunakan di UPTD Samsat Kabupaten Majene telah menjadi instrumen penting dalam mendukung modernisasi pelayanan publik di bidang perpajakan daerah.

Sistem informasi akuntansi penerimaan kas di UPTD Samsat Kabupaten Majene terbukti efektif dalam mendukung proses penerimaan kas. Hal ini ditunjukkan dengan pencatatan transaksi penerimaan kas yang mencapai 98% pada hari yang sama, sehingga laporan penerimaan kas dapat segera disusun sesuai format standar provinsi. Sistem ini juga memudahkan proses pemantauan dan pelaporan penerimaan kas secara langsung oleh Bapenda Provinsi Sulawesi Barat dan instansi terkait lainnya, sehingga meminimalkan risiko kesalahan pencatatan dan mempercepat proses penyetoran ke kas daerah.

Selain itu, sistem ini mendukung koordinasi antarinstansi dalam Kantor Bersama Samsat (Bapenda, Polri, dan Jasa Raharja). Proses pelayanan wajib pajak berlangsung sesuai prosedur standar, mulai dari validasi data kendaraan, penghitungan pajak, pembayaran, hingga pencetakan dokumen, sehingga memperlancar alur penerimaan kas dan meningkatkan kepuasan wajib pajak. Hal ini sekaligus memastikan bahwa setiap langkah pelayanan tercatat dan terdokumentasi dengan baik dalam sistem, sehingga

mempermudah proses audit, pemeriksaan internal, maupun pengawasan oleh pihak berwenang.

Keberadaan sistem informasi ini juga berperan penting dalam memperkuat pengendalian internal. Dengan setiap transaksi yang tercatat secara otomatis dan dapat dipantau real-time, peluang untuk terjadinya manipulasi data atau kebocoran penerimaan kas dapat ditekan sekecil mungkin. Sistem ini juga mendukung transparansi kepada masyarakat karena wajib pajak dapat memperoleh bukti pembayaran yang sah dan sesuai data transaksi yang terjadi.

Secara keseluruhan, sistem ini tidak hanya membantu kelancaran operasional UPTD Samsat Kabupaten Majene, tetapi juga menjadi bagian penting dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) di bidang penerimaan kas daerah. Efektivitas sistem ini menjadi cerminan upaya modernisasi pelayanan pajak daerah yang berbasis teknologi informasi, sejalan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Sistem informasi akuntansi penerimaan kas di UPTD Samsat Kabupaten Majene memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan efisiensi operasional. Salah satu indikator utamanya adalah berkurangnya penggunaan dokumen manual dalam setiap tahap proses penerimaan kas. Hal ini terlihat dari seluruh dokumen, mulai dari laporan penerimaan kas, bukti transaksi, hingga dokumen pendukung lainnya, sudah berbasis digital dan dihasilkan secara otomatis oleh sistem. Dengan digitalisasi ini, UPTD Samsat Kabupaten Majene tidak lagi bergantung pada pencatatan manual yang rawan terjadi kesalahan, lambat, dan membutuhkan upaya rekap yang berulang.

Digitalisasi proses pelaporan juga mendorong percepatan waktu kerja. Laporan penerimaan kas dapat disusun secara otomatis dan real-time, sehingga petugas tidak perlu lagi menyusun laporan secara manual setiap akhir hari kerja. Hal ini tidak hanya menghemat waktu tetapi juga mengurangi potensi human error yang sering terjadi dalam proses rekap manual. Format laporan yang dihasilkan sudah sesuai standar yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, sehingga memudahkan dalam proses verifikasi dan pelaporan ke tingkat provinsi.

Struktur organisasi UPTD Samsat Kabupaten Majene juga menjadi faktor pendukung efisiensi ini. Setiap bagian dalam struktur organisasi memiliki pembagian

tugas dan tanggung jawab yang jelas. Tidak ada perangkapan tugas antarbagian, sehingga pekerjaan dapat dilaksanakan lebih fokus dan optimal. Kasir bertanggung jawab penuh pada penerimaan kas, bagian administrasi mengelola data dan dokumen pendukung, sedangkan bagian keuangan menangani penyusunan laporan dan setoran penerimaan kas ke kas daerah. Pembagian kerja yang jelas ini meminimalkan risiko tumpang tindih pekerjaan dan mendukung kelancaran alur pelayanan.

Efisiensi sistem ini juga ditunjukkan pada proses rekonsiliasi data. Seluruh transaksi penerimaan kas secara otomatis tersinkronisasi dalam sistem, sehingga proses rekonsiliasi antarinstansi yang terlibat di Samsat (Bapenda, Polri, dan Jasa Raharja) menjadi lebih cepat dan akurat. Setiap instansi dapat mengakses data yang sama secara real-time, sehingga mengurangi potensi selisih data atau perbedaan laporan. Hal ini mendukung transparansi dan mempermudah audit internal maupun pemeriksaan oleh instansi terkait.

Namun, meskipun sistem ini telah berjalan efisien, masih terdapat tantangan yang perlu mendapatkan perhatian. Salah satunya adalah gangguan jaringan yang sesekali terjadi, terutama pada waktu-waktu sibuk. Gangguan jaringan ini dapat menghambat proses input data secara daring dan berdampak pada kecepatan pelayanan kepada wajib pajak. Jika gangguan terjadi cukup lama, petugas terpaksa harus menunda proses input hingga jaringan kembali normal, yang tentu saja dapat menurunkan efisiensi sistem.

Oleh karena itu, untuk mempertahankan dan meningkatkan efektivitas serta efisiensi sistem informasi akuntansi penerimaan kas, perlu dilakukan upaya perbaikan infrastruktur teknologi informasi. Peningkatan kapasitas server, perbaikan kualitas jaringan internet, serta adanya sistem cadangan (backup system) menjadi hal yang penting untuk diupayakan. Dengan dukungan infrastruktur yang handal, sistem informasi akuntansi penerimaan kas diharapkan dapat terus memberikan layanan prima kepada masyarakat, mendukung tata kelola keuangan daerah yang baik, dan mendorong modernisasi pelayanan publik berbasis teknologi informasi.

Selain itu, penguatan kompetensi sumber daya manusia (SDM) juga menjadi faktor penting dalam mendukung efisiensi sistem. Petugas yang mengelola sistem informasi harus memiliki kemampuan teknis yang memadai agar dapat mengoperasikan sistem dengan optimal dan mampu mengatasi kendala teknis yang muncul dengan cepat. Pelatihan dan pendampingan berkelanjutan bagi operator sistem menjadi langkah strategis agar efektivitas dan efisiensi sistem dapat terus ditingkatkan dari waktu ke waktu.

Pada akhirnya, keberadaan sistem informasi akuntansi penerimaan kas yang efisien tidak hanya memberikan manfaat bagi internal Samsat dan pemerintah daerah, tetapi juga memberikan dampak positif bagi masyarakat. Proses pelayanan yang lebih cepat, akurat, dan transparan akan meningkatkan kepuasan wajib pajak serta memperkuat kepercayaan publik terhadap pelayanan pemerintah. Dengan efisiensi yang terus ditingkatkan, UPTD Samsat Kabupaten Majene dapat menjadi contoh praktik baik dalam pengelolaan penerimaan kas daerah yang modern dan profesional.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

1. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa sistem informasi akuntansi penerimaan kas pada UPTD Samsat Kabupaten Majene telah berjalan dengan baik dan mendukung efektivitas serta efisiensi dalam pengelolaan penerimaan kas daerah.
2. Efektivitas sistem informasi akuntansi penerimaan kas ditunjukkan melalui kemampuan sistem dalam mencatat transaksi secara tepat waktu, akurat, dan transparan. Pencatatan transaksi penerimaan kas mencapai 98% pada hari yang sama, sehingga laporan penerimaan kas dapat segera disusun dan disampaikan sesuai dengan format standar Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Sistem ini juga memungkinkan pemantauan data penerimaan kas secara real-time oleh Bapenda provinsi dan instansi terkait lainnya, sehingga memperkuat pengendalian internal dan mengurangi risiko kesalahan pencatatan.
3. Sistem informasi akuntansi penerimaan kas tercermin dari berkurangnya penggunaan dokumen manual, percepatan proses pelaporan, dan tidak adanya perangkapan tugas di dalam struktur organisasi. Pekerjaan setiap bagian sudah terfokus sesuai bidang tugasnya, sehingga mendukung kelancaran operasional dan pelayanan kepada wajib pajak. Selain itu, sistem ini mempermudah proses rekonsiliasi data antarinstansi yang tergabung dalam Kantor Bersama Samsat (Bapenda, Polri, dan Jasa Raharja).
4. Meskipun sistem informasi akuntansi penerimaan kas telah berjalan efektif dan efisien, penelitian ini juga menemukan adanya kendala berupa gangguan jaringan pada waktu tertentu yang dapat menghambat input data daring.

### **Saran**

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka disarankan beberapa hal berikut agar sistem informasi akuntansi penerimaan kas di UPTD Samsat Kabupaten Majene dapat semakin optimal:

1. Peningkatan infrastruktur teknologi informasi, terutama dalam hal jaringan internet dan server pendukung, agar gangguan yang dapat menghambat input data secara daring dapat diminimalkan. Hal ini penting untuk menjaga kelancaran proses pelayanan dan pencatatan transaksi penerimaan kas.
2. Penguatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) melalui pelatihan dan pendampingan berkelanjutan bagi operator sistem informasi akuntansi. Hal ini bertujuan agar petugas semakin terampil dalam mengoperasikan sistem dan mampu mengatasi kendala teknis dengan cepat dan tepat.
3. Pengembangan sistem cadangan (*backup system*) yang dapat digunakan apabila terjadi gangguan pada sistem utama, sehingga proses pelayanan dan pencatatan penerimaan kas tetap dapat berjalan tanpa hambatan.
4. Pemanfaatan sistem informasi untuk inovasi layanan seperti pemberitahuan otomatis kepada wajib pajak melalui SMS atau email, agar semakin meningkatkan kepuasan dan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan Samsat.
5. Monitoring dan evaluasi berkala terhadap sistem informasi akuntansi penerimaan kas, agar sistem terus diperbarui dan disesuaikan dengan perkembangan teknologi informasi serta kebutuhan pelayanan publik yang semakin dinamis.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdatul'Asyiroh, V., & Elly, M. I. (2022). Evaluasi Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Pengendalian Penerimaan Kas Pada BTPN KCP Probolinggo. *Jurnal Ilmiah Ecobuss*, Vol. 10(2), 92-102.
- Anggraini, P.N. (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Sistem Informasi Akuntansi Di Lingkungan Pemerintahan Daerah Serdang Bedagai. *Journal Economy And Currency Study*, Vol. 1, Issue 2.
- Astriya, K. (2019). Analisi Efektivitas Sistem Informasi Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Pada PT. Perkebunan Nusantara IV (Persero) Medan. (*Doctoral dissertation, Universitas Medan Area*).
- Djoharam, F. (2021). Analisis Sistem Informasi Akuntansi Penerimaan Kas dan Pengeluaran Kas Pada PT. Hasrat Abadi (Outlet Tumiting). *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, Vol. 9(2).

- Nugrahanto. B.S.P. (2012). *Analisis Faktor-Faktor yang Menentukan Efektivitas Sistem Informasi Akuntansi Pada Organisasi Sektor Publik (Studi Kasus pada RSUD Soedirman Mangun Sumarso Wonogiri)*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Ilmi, R. F., Malikah, A., & Hariri, H. (2022). Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Sistem Informasi Akuntansi Penggajian Karyawan Pada PT. Tani Cemerlang. *e\_Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 11(03).
- Kurniawati, Y. (2018). Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan Di Desa. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 1(1), 18.
- Muhamad, G., Juhara, D., Jannah, A., & Ramdhani, A. (2021). Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Penerimaan Kas Terhadap Pengendalian Intern Penerimaan Kas:(Studi pada salah satu perusahaan penginapan di Kabupaten Bandung Barat). *Journal Acman: Accounting and Management*, Vol. 1(2), 97-103.
- Mukhram, M., & Ayuandiani, W. (2023). *The Influence Of Tax Sanctions And Tax Services On Motor Vehicle Taxpayer Compliance At The Samsat Office Of Majene District. Riwayat: Educational Journal of History and Humanities*, 6(3), 1558-1567.
- Riskayanti, (2019). Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Pembelian dan Pengeluaran Kas (Studi Kasus Pada PT. Bumi Sarana Beton Makassar). *Universitas Muhammadiyah Makassar*.
- Salamiyah, M. (2019). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Penggunaan Sistem Informasi Akuntansi (*Doctoral dissertation, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Magelang*).
- Suawah, M. A. (2021). Analisis Sistem Informasi Akuntansi Penerimaan Kas dalam Meningkatkan Pengendalian Internal pada Rumah Sakit GMIM Siloam Sonder. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, Vol. 9(3), 1463-1471.
- Sustia. N.L. (2020). *Analisis Informasi Akuntansi Penerimaan Kas Dalam Peningkatan Pendapatan Pada PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Devisi Regional 1 Sumatera Utara. Skripsi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*.
- Sugiyono (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alphabet.
- Yusup, M., & Sudrajat, J. (2018). *Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Penerimaan Kas Terhadap Pengendalian Pendapatan Pada Perum Damri Bandung*. None.
- Zoana, M.N. (2016). Analisis Efektivitas Sistem Informasi Akuntansi Penerimaan Kas Pada Rumah Sakit Ibu dan Anak Hamami Palembang. *Skripsi, Universitas Muhammadiyah Palembang*